

# KOLABORASI PANDITA DAN LAPAS KLAS IIA PEMUDA TANGERANG DALAM MEMBINA KEAGAMAAN NARAPIDANA BUDDHA

## *A Collaboration Between Priest and The Prison IIA for Youngsters in Tangerang in Developing Spiritual of Buddhist Prisoners*

KEMANYA KARBONO

Sekolah Tinggi Agama Buddha  
Negeri Tangerang Banten  
e-mail: akarbono@yahoo.com

Naskah diterima: 15 September  
2015

Naskah diseleksi: 6 November 2015

Naskah direvisi: 17 November 2015

Naskah disetujui penulis:  
28 November 2015

### **ABSTRACT**

*This study was held in The Prison IIA for youngsters in Tangerang in 2012. Using phenomenology approach and model of Miles and Huberman on data analysis, this study found the following findings. The implementation of development cooperation with the organization's religious Buddhist Youth Association of Indonesian Chinese (IPTI) is coordinating the priests to perform a guidance. The guidance system used by priests was indirect contact (direct approach to coaching face to face). Judging from the shape, materials, processes, methods, evaluation, support others and background builder, tends to lead to the pattern of top-down approach (coaching from top to bottom). Forms of guidance given by priests were: (1) Dhamma Desana (religious discourse) about morality (sila), meditation (samadhi) and wisdom (panna), motivation; (2) Exercise chant and practice rituals (sembahyang); (3) Vihara Gita (spiritual songs); (4) Dhamma Sadhana (meditation retreat). The implementation of coaching did not have any curriculum yet, and the evaluation was done verbally. Supporting factors to the coaching could be classified into two: external and internal. Internal factors include: (1) Lack of coaching medium; (2) there was no Buddhism official coach; (3), the quality and variety of coaching; (4) lack of prisoners motivation. External factors include: (1) lack of coordination and communication with relevant agencies either governmental or non governmental agencies which concerned on Buddhists coaching; (2) Lack of public awareness and participation in coaching.*

**Keywords:** *Buddha Religious Guidance, pandita, prison*

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini dilakukan di Lembaga pemasyarakatan Klas IIA Pemuda Tangerang pada tahun 2012. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologic, serta analisis data mengacu pada model Miles and Huberman, dalam penelitian ini diperoleh temuan sebagai berikut. Penyelenggaraan pembinaan keagamaan Buddha bekerjasama dengan organisasi Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (IPTI) yang mengkoordinir para Romo Pandita. Sistem pembinaan yang digunakan oleh pandita adalah indirect contact (pembinaan dengan pendekatan langsung tatap muka). Pembinaan ini cenderung berpola top down approach (pembinaan dari atas ke bawah). Bentuk pembinaan oleh pandita berupa: (1) Dhamma Desana (ceramah keagamaan) dengan materi sekitar moralitas (sila), meditasi (samadhi) dan kebijaksanaan (panna), motivasi; (2) Latihan membaca paritta dan latihan puja bakti (sembahyang); (3) Vihara Gita (Lagu rohani); dan (4) Dhamma Sadhana (retreat meditasi). Pelaksanaan pembinaan belum memiliki kurikulum, dan evaluasi dilakukan hanya secara lisan. Faktor yang mempengaruhi pembinaan meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa: (1) minimnya sarana pembinaan, (2) tidak ada petugas pembina agama Buddha, (3) kualitas dan ragam pembinaan kurang, dan (4) rendahnya motivasi narapidana. Faktor eksternal berupa: (1) Minimnya koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait baik instansi pemerintah maupun non pemerintah yang concern terhadap pembinaan umat Buddha; dan (2) Rendahnya kepedulian dan keikutsertaan masyarakat dalam pembinaan.*

**Kata kunci:** *Pembinaan Keagamaan Buddha, pandita, Lembaga Pemasyarakatan*

## PENDAHULUAN

Pembinaan keagamaan yang dilakukan pandita di Lembaga pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Pemuda Tangerang menarik untuk dikaji. Kasus-kasus kriminalitas pada penghuni Lapas tersebut telah melampaui batas-batas lintas agama, tidak terkecuali tindak kriminal yang dilakukan umat Budha dan pada akhirnya terkena pidana dan mendekam di penjara.

Pergeseran nilai budaya dan moral yang berujung tindakan kriminal yang berimplikasi meningkatnya jumlah narapidana dipengaruhi oleh banyak faktor. Secara khusus pada psikis remaja, gejala emosional relatif lebih labil dan fluktuatif (Jalaludin, 2007). Kondisi ini lebih mendorong pemuda untuk melakukan tindakan kriminal. Faktor-faktor pendorong tindakan kriminal pada dasarnya dikarenakan aspek struktural dan aspek kultural, seperti yang dinyatakan oleh Rano Karno –dalam konferensi pers setelah anak angkatnya yaitu Raka Widayarma terjerat kasus narkoba- bahwa salah satu faktor yang mendorong anaknya terjerumus narkoba adalah kurangnya perhatian dia terhadap anak angkatnya (<http://www.kompasiana.com/>, diakses 2 Oktober 2012). Aspek struktural dan kultural menjadi pemicu seseorang untuk melakukan tindakan kriminal dan akhirnya masuk Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Sebagai sebuah lembaga pembinaan yang dikonstruksi secara sosial, Lapas memiliki tanggung jawab yang tidak ringan untuk normalisasi kehidupan para narapidana. Melalui penerapan mekanisme pendisiplinan, Lapas diharapkan dapat mengubah warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia yang patuh dan berguna, mampu memberikan terapi psikis, dan menjadi tempat *shock therapy* psikologis atas rasa malu yang ditanggung oleh narapidana dari situasi keterasingan sosial. Program pendidikan agama juga menjadi keharusan untuk diberikan. Pemberian pembinaan keagamaan dan berbagai pengetahuan akan membekali mereka untuk diterapkan ketika kembali ke tengah-tengah

masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-undang no 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu tercapainya reintegrasi sosial. Pembinaan di Lapas harus berupa perlindungan bukan penekanan (pembalasan) seperti pemerasan dan perlakuan tidak senonoh. Walaupun realitasnya masih banyak terjadi kekerasan di dalam Lapas, seperti hasil penelitian Anton Setiawan yang menyatakan banyak kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan viktimisasi terhadap para terpidana (Setiawan, 2009).

Ruang lingkup pembinaan untuk narapidana di antaranya adalah pembinaan kesadaran beragama. Sesuai regulasi pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan. Hal tersebut berarti setiap Lapas seyogyanya memiliki petugas pembina keagamaan dari semua agama agar proses pembinaan bisa berjalan dengan baik. Realitasnya tidak semua Lapas memiliki petugas pembina keagamaan dari semua agama, dan dukungan masyarakat baik secara perorangan atau lembaga swadaya masyarakat sangat minim sehingga penyelenggaraan pembinaan kurang optimal. Untuk narapidana yang beragama Buddha, dukungan dari luar seharusnya muncul, terutama dari majelis-majelis agama Buddha yang bertanggung jawab atas pembinaan.

Di Indonesia, sistem penjaratan telah dikenal sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Kemudian, dalam perkembangannya sistem kepenjaraan ini diubah menjadi sistem pemasyarakatan yang diperkenalkan mulai tahun 1964 (Priyatno, 2006: 97). Amanat ini dimaksudkan dalam rangka *retooling* dan *reshaping* dari sistem kepenjaraan yang dianggap tidak selaras dengan adanya ide pengayoman sebagai konsepsi hukum nasional yang berkepribadian Pancasila. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan telah memperkenalkan perlakuan (*treatment*) ke dalam sistem kepenjaraan Indonesia yang pelaksanaan pembinaannya berdasarkan prinsip-prinsip pemasyarakatan.

Lapas merupakan tempat untuk membina narapidana. Pembinaan narapidana dan anak didik ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan (*intramural treatment*). Penelitian ini terfokus pada pembinaan keagamaan bagi narapidana yang beragama Buddha. Perlu diketahui juga mengenai pengertian keagamaan yaitu segala sesuatu mengenai agama, dalam hal ini keagamaan mengandung arti yang sejalan dengan religiusitas. Mengikuti pendapat Koentjaraningrat (1987) bahwa secara umum sistem religi terdiri atas lima komponen yang saling berkaitan satu sama lain, yakni: (1) emosi keagamaan, (2) sistem keyakinan, (3) sistem nilai dan pandangan hidup, (4) peralatan ritus dan upacara, (5) umat dan institusi keagamaan. Jadi pengertian pembinaan keagamaan Buddha adalah pembinaan berkaitan dengan agama Buddha; dengan harapan peserta yang dibina memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang agama Buddha (*pariyati*), kemudian mempraktekkan ajaran tersebut (*patipati*) sehingga memperoleh kehidupan yang lebih baik karena memiliki kebijaksanaan (*pativedha*).

Sistem pembinaan melalui media massa dan elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan dua macam pendekatan, yaitu: pendekatan langsung (*direct contact*) dan pendekatan tidak langsung (*indirect contact*) (Sudjana, 2006: 27). Sementara itu, Harsono (Harsono, 1995: 26) mengungkapkan bahwa pembinaan dapat dilakukan dengan: 1) pendekatan dari atas ke bawah (*top down approach*), materi pembinaan berasal dari pembina, atau paket pembinaan telah disediakan dari atas, narapidana tidak ikut menentukan jenis pembinaan yang akan dijalankannya tetapi langsung menerima pembinaan dari Pembina, 2) pendekatan dari bawah (*bottom up approach*), suatu cara pembinaan dengan memperhatikan kebutuhan pembina atau kebutuhan belajar narapidana, narapidana ikut serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran.

Teori-teori pemidanaan banyak diungkap oleh para sarjana dengan mempertimbangkan aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana. Munculnya berbagai pikiran mengenai manfaat pidana melahirkan beberapa teori dan konsep pembinaan dalam pemidanaan teori-teori tersebut, antara lain: a) Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributive*), di mana pidana dimaksudkan untuk membalas tindak pidana yang dilakukan seseorang; b) Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian*), di mana tujuan pidana bukanlah sekedar pembalasan, tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat; c) Teori Gabungan (*integratif*), di mana tujuan pidana selain membalas kesalahan pidana juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.

Pembinaan terhadap narapidana dapat dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dan oleh tokoh agama (pandita). Napi yang beragama Buddha tentu perlu mendapat pembinaan dari pandita. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pandita (pandit) diartikan orang ahli dalam ilmu agama dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari (Pusat Bahasa Depdiknas, 2008: 1011).

Pengertian pandita dapat ditemukan dalam "*Manggala Sutta, Khudaka Nikaya*" (kotbah tentang 38 berkah utama) salah satunya adalah "*pandita sevana*" (bergaul dengan orang bijak). Istilah atau gelar "pandita" sesungguhnya mengandung makna agamis yang mengacu langsung pada keluhuran batin seseorang. Walaupun sebutan pandita pada dasarnya diberikan secara selektif, kiranya tidak bisa seratus persen dijadikan sebagai jaminan mutlak atas kadar batin seseorang. Pandita yang dimaksud dalam "*Mangala Sutta*" adalah orang yang memiliki, mengembangkan, dan senantiasa mempergunakan kebijaksanaan atau kearifan dalam segala hal, orang bijak bisa dijadikan padanan dari pandita (Sanjivaputta, 1991).

Dalam kitab *Paramatthajotika, Buddhaghosa Thera* mendefinisikan pandita sebagai orang yang menempuh kehidupan

dengan kebijaksanaan demi kemanfaatan dalam kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Beliau mencontohkan para *Sammāsambuddha*, *Pacceka Buddha*, para *Asitima-savaka* (80 siswa utama) dan *savaka* lainnya (*Sanjivaputta*, 1991: 12).

Pandita yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pandita dalam pengertian gelar yang diberikan oleh badan atau organisasi keagamaan Buddha kepada seseorang yang dinilai mempunyai kemampuan yang cukup memadai dalam membabarkan ajaran Sang Buddha, yang bersifat fungsional tanpa didasarkan pada pendidikan akademis yang ditempuh pada jenjang pendidikan tinggi tertentu. Tugas utama pandita sebenarnya adalah menyebarkan Buddha Dhamma dan membantu anggota *Sangha* (*bhikhu*) untuk memberikan pelayanan tertentu kepada umat Buddha yang tidak bisa dilakukan oleh para *bhikhu*, misalnya memimpin ritual perkawinan, ritual perayaan hari raya, dan lain-lain (*Megabudhi Kota Tangerang*, 2012). Sang Buddha dalam *Udayi Sutta*, *Anguttara Nikaya*, *Pancaka Nipata* menganjurkan agar dalam mengajarkan *Dhamma* seseorang harus membangun lima standar atau lima sifat yang harus dimiliki, yakni: (1) Saya akan memberikan khutbah yang bertingkat; (2) Saya akan memberikan khutbah yang masuk akal; (3) Saya berbicara karena tergerak simpati; (4) Saya akan berbicara bukan demi keuntungan duniawi; (5) Saya akan berbicara tanpa menyindir diri sendiri atau orang lain (*Nyanaponika*, 2003: 221).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan pembinaan keagamaan Buddha di Lapas Klas IIA Pemuda Tangerang; mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung; dan mengetahui upaya yang dilakukan oleh pandita dan Lapas dalam mengatasi hambatan. Adapun signifikansi penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi Lapas dan Kementerian Agama dalam mengevaluasi pelaksanaan pembinaan kerohanian, khususnya pembinaan keagamaan Buddha.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan *qualitative research* dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini berusaha mengungkap dan menggambarkan tentang pelaksanaan pembinaan keagamaan Buddha oleh pandita di Lapas Pemuda Tangerang. Analisis data untuk memperoleh kesimpulan menggunakan metode induktif. Analisis permasalahan menggunakan orientasi pendekatan *sociologic phenomenologic*.

Penelitian dilaksanakan selama empat bulan dari bulan September-Desember 2012 di Lapas Klas IIA Pemuda Tangerang, jalan Lapas Pemuda, Kelurahan Pabuaran, Kota Tangerang.

Peneliti sebagai *human instrument* terjun langsung di dalam kancah penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung dan pengamatan secara partisipatif (*participation observation*), yaitu pengamat terlibat langsung secara aktif dalam subjek penelitian (*Spradley dalam Moleong*, 2006: 38). Adapun wawancara dilakukan terhadap informan kunci, yaitu: Kepala Lapas Klas IIA Pemuda Tangerang atau staff yang memiliki tanggung jawab terhadap pembinaan, Romo Pandita dan narapidana.

Proses analisis data dalam penelitian ini dengan mereduksi data, penyampaian data, dan membuat simpulan. Hal ini sebagaimana alur yang dikemukakan oleh *Miles & Huberman* (dalam *Suprayogo*, 2003).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Lapas Klas IIA Pemuda Tangerang.

Lapas Klas IIA Pemuda Tangerang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03.UM.01.06 tanggal 16 Desember 1983 Tahun 1983 tentang Penetapan Lapas Tertentu Sebagai Rumah Tahanan Negara. Dalam Lampiran II dari

Surat Keputusan tersebut Lapas Klas IIA Pemuda Tangerang, di samping ditetapkan sebagai Lapas, juga sebagian ruangnya ditetapkan sebagai Rumah Tahan Negara (Tetra Destorie Imantoro, wawancara 3 Desember 2012). Bangunan Lapas didirikan di areal tanah seluas 385.420 M<sup>2</sup>, dengan luas tanah bangunan sebesar 28.610 M<sup>2</sup> dan luas bangunan sebesar 10.312 M<sup>2</sup>. Bentuk bangunan model kipas, yang terdiri dari enam blok sebanyak 120 kamar dengan kapasitas 1.356 orang.

Lapas Klas IIA Pemuda Tangerang juga difungsikan sebagai Lapas penyangga dari kelebihan kapasitas di berbagai Lapas di Provinsi Banten. Akibatnya, fungsi sebagai Lapas yang khusus menampung dan membina narapidana pemuda sudah tidak murni lagi. Hal ini diperkuat dengan ditetapkannya Lapas Pemuda sebagai Rutan yang notabene tidak mengenal pengklasifikasian dari aspek umur.

Sarana dan prasarana yang ada di Lapas Klas IIA Pemuda Tangerang di antaranya yaitu: (1) Tempat ibadah, terdiri dari: Masjid, Gereja, Vihara (Cetiya); (2) Sarana olah raga, terdiri dari: lapangan futsal, lapangan bulu tangkis, lapangan basket, lapangan volley, dan tenis meja.

Penghuni Lapas Klas IIA Pemuda Tangerang sampai saat penelitian ini dilakukan berjumlah 2.002 orang yang terdiri dari 1.173 orang narapidana dan 830 orang tahanan dengan agama yang bervariasi. Mereka terdiri dari umat Islam 1760 (87.9%), Kristen 133 (6.64%), Khatolik 27 (1.34%), Hindu 5 (0.24%), dan umat Buddha 77 (3.84%). Jenis tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana di Lapas Klas IIA Pemuda Tangerang cukup beragam, namun kasus terbesar adalah tindak pidana narkoba, sebesar 1.294 orang (64.6%) (Dokumentasi Lapas Tangerang 2012).

### **Pelaksanaan dan Bentuk Pembinaan Keagamaan Buddha**

Pelaksanaan pembinaan keagamaan Buddha, Lapas Klas IIA Pemuda Tangerang bekerja sama dengan organisasi sosial kemasyarakatan

Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (IPTI). Hal itu sesuai penjelasan dari petugas lapas sebagai berikut;

“Untuk pembinaan narapidana Buddhis ada, kita kerjasama dengan IPTI, ya itu dilakukan karena Lapas tidak memiliki petugas yang khusus melakukan pembinaan untuk narapidana yang beragama Buddha, kalau petugas yang membina narapidana Islam ada” (Imantoro, Kasi Pembinaan, wawancara 10 Nopember 2012).

Dalam pelaksanaannya, IPTI yang mengatur dan membuat jadwal pembina keagamaan Buddha, jadwal dibuat pertiga bulan. IPTI bekerjasama dengan para Romo Pandita dari berbagai majelis agama Buddha di Indonesia, di antaranya Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia (MAGABUDHI), Majelis Agama Buddha Mahayana Indonesia, dan lain-lain. Namun demikian, kerjasama antara IPTI dengan Romo Pandita secara pribadi, bukan kerjasama antara organisasi IPTI dengan majelis agama Buddha tertentu. Hal tersebut pernah ditawarkan oleh IPTI kepada salah satu majelis keagamaan Buddha, tetapi Romo Pandita tidak bersedia dengan berbagai alasan. Pembinaan keagamaan Buddha di Lapas Klas IIA Pemuda Tangerang dilakukan seminggu sekali, yaitu setiap hari Sabtu 09.00-12.00 WIB, bertempat di Cetiya Kusala Cetana, yang terdapat di blok E Lapas Klas IIA Pemuda Tangerang (Hendra, Ketua IPTI, wawancara 24 Nopember 2012).

Bentuk Pembinaan Keagamaan Buddha di Lapas Klas IIA Pemuda Tangerang antara lain sebagai berikut. *Pertama*, pengajaran tentang tata cara ritual (puja bakti), dari sarana perlengkapan ritual, cara membaca parita dan jenis-jenis Parita atau Sutta yang dibaca ketika melakukan Puja Bakti. Hal ini dinyatakan salah satu pembina Agama Budha, Romo Adi Triswantoro sebagai berikut:

“Bentuk pembinaan antara lain ceramah, ada pertanyaan juga, saya pernah juga beberapa kali mengajarkan cara membaca Paritta, masalahnya banyak dari mereka yang gak hafal parita sama sekali, Mas” (wawancara 3 Desember 2012).

*Kedua*, Ceramah Dhamma atau *dhammadesana*, dengan materi sekitar dana, moralitas (sila), meditasi (Samadhi), motivasi untuk melupakan kesalahan yang telah diperbuat. Materi pembinaan diserahkan sepenuhnya kepada para pandita disesuaikan dengan situasi dan kondisi tanpa ada kurikulum yang baku. *Ketiga*, latihan meditasi, pelaksanaannya di Cetiya Kusala Cetana pada waktu jadwal pembinaan di bawah bimbingan para Romo Pandita. Hal ini diungkapkan oleh Romo Kartika Yos: "Saya selalu mengajak mereka meditasi lagi di akhir ceramah saya" (wawancara, 10 Oktober 2012).

*Keempat*, Vihara Gita, di mana beberapa romo membawa alat musik (gitar), dan mengajarkan lagu-lagu Buddhis kepada para narapidana. Menurut beliau, bernyanyi lagu-lagu rohani membuat narapidana lebih senang. Hal tersebut dinyatakan oleh Romo Adi Triswanto:

"... Kalau ceramah pasti, tapi saya selalu selingi dengan lagu lagu Buddhis di tengah-tengah ceramah, *lah wong* saya kan suka main gitar, jadi ya nyanyi itu wajib dalam setiap ceramah saya, di samping itu mas, kalau diajak nyanyi paling gak kan mengurangi stress para narapidana" (wawancara 3 Desember 2012).

Pembinaan keagamaan Buddha di Lapas Klas IIA Pemuda Tangerang membawa manfaat yang sangat banyak bagi para narapidana, di antaranya narapidana dapat menghafal *Paritta*, mendapatkan ketenangan, dan mengubah perilaku, seperti dalam beberapa kutipan wawancara berikut.

"Meskipun beragama Buddha saya tidak hafal satupun *Paritta* dalam puja bakti (sembahyang), setelah beberapa kali ikut pembinaan agama saya mulai hafal beberapa *Paritta* di antaranya, *namakarapatha*, *Vandana*, *Tisarana* dan Pancasila, untuk *Paritta* yang lain perlu belajar lebih lama dan lebih keras lagi (Dede, narapidana, wawancara 24 Nopember 2012).

"Saya merasakan ketenangan ketika masuk ke ruang vihara (dharmasala) dan mengikuti pembinaan, karena dapat berlatih meditasi, ruangnya juga lebih luas dan segar di banding sel saya" (Rudi, narapidana, wawancara 8 Desember 2012). "Dulu gua ngomong jorok

ama ngomong kasar sering banget, tapi setelah beberapa kali dengerin ceramahnya romo agak mendingan, ya masih suka ngomong jorok sih tapi jarang" (Toni, narapidana, wawancara 15 Desember 2012). "Saya pernah mengontrol pada saat pembinaan, yang saya lihat para narapidana sih bersikap tenang dan duduk dengan rapih, mungkin ini salah satu efek dari pembinaan tersebut" (Imantoro, petugas lapas, wawancara 13 Desember 2012).

## **Penghambat Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan Buddha**

Aspek yang menjadi penghambat terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal sebagaimana paparan berikut.

### **A. Aspek Internal**

Aspek internal yang menjadi penghambat pembinaan Keagamaan Buddha di Lapas Klas IIA Pemuda Tangerang terdiri atas lima faktor. Pertama, sarana/fasilitas pembinaan yang kurang serta tidak ada pembina khusus bagi narapidana beragama Buddha, hal tersebut dinyatakan oleh Kasi Pembinaan:

"...Tapi ya itu mas, kamu lihat sendiri kan tempat pembinaanya tidak terlalu luas, sarananya juga cuma ada sound sistem yang tidak terlalu bagus. Kendala lainnya mas, kita tidak punya petugas khusus untuk yang Buddha dan Kristen, kalau yang bina Islam sih ada" (Imantoro, wawancara 10 Oktober 2012).

Kedua, kuantitas petugas sedikit, sebagaimana disampaikan oleh Kasi Pembinaan, Imantoro (wawancara 13 Oktober 2012)

Ketiga, kualitas dan ragam program pembinaan keagamaan Buddha yang tidak bervariasi, program yang selama ini sudah berjalan mayoritas hanya ceramah keagamaan (Toni, narapidana, wawancara 15 Desember 2012).

Keempat, variasi tingkat pendidikan dan pemahaman *Dhamma* narapidana. Hal ini menimbulkan kesenjangan tingkat intelektual narapidana sehingga berpengaruh dalam hasil pembinaan keagamaan. Data narapidana yang tidak sekolah sebanyak 86 (4.29%),

lulusan sekolah dasar sebanyak 256 orang (12.78%), termasuk dalam hal ini terdapat 3 narapidana beragama Buddha yang tidak lulus sekolah dasar (Toni, narapidana, wawancara 15 Desember 2012). Tingkat pemahaman *Dhamma* para narapidana juga sangat rendah. Dari wawancara dengan beberapa narapidana, mereka mengatakan belum pernah ke tempat ibadah (Vihara) sebelumnya. Memasuki tempat ibadah (Cetiya Kusala Cetana) yang ada di Lapas Pemuda Tangerang adalah pengalaman pertama. Dede, Toni, dan Rudi menyampaikan pernyataan yang hampir sama:

“Dulu kita mah gak pernah ke vihara, males, sekarang giliran di penjara agak sering, ya menyesal juga kenapa dulu gak sering ke vihara” (wawancara, 22 Desember 2012).

Kelima, rendahnya motivasi narapidana dalam mengikuti pembinaan keagamaan, seperti diungkapkan Dede dan Toni berikut.

“Anak-anak banyak yang males, Pak” (Dede, wawancara 22 Desember 2012). “Ada berapa temen, Pak, yang mengikuti pembinaan keagamaan Kristen, di sono kalau dah selesai diberi bingkisan Pak, ada sabun mandi, sikat gigi, pasta gigi, enak dah pokoknya” (Toni, wawancara 22 Desember 2012).

#### b. Aspek Eksternal

Aspek eksternal yang menjadi penghambat Pembinaan Keagamaan Buddha di Lapas Klas IIA Pemuda Tangerang sebagai berikut.

Pertama, minimnya koordinasi dan komunikasi penyelenggaraan pembinaan keagamaan Buddha dengan instansi pemerintah maupun non pemerintah yang *concern* terhadap penyuluhan agama Buddha (Imantoro, wawancara 15 Desember 2012).

Kedua, rendahnya kepedulian masyarakat. Masyarakat baik perorangan maupun secara organisasi (lembaga swadaya masyarakat) harus ikut berperan dalam pembinaan narapidana, tentunya setelah ada kerja sama dengan pihak Lapas.

“...Mas, kalau mau pembinaan berhasil, paling tidak ada tiga yang mendukung, pihak lembaga

pemasyarakatan, narapidana, dan masyarakat. Kalau tiga jalan maka pembinaan pasti berjalan baik” (Imantoro, wawancara 15 Desember 2012).

Imantoro dan Suratmin juga menjelaskan bahwa selain faktor penghambat, ada sebenarnya juga sudah terdapat faktor pendukung penyelenggaraan pembinaan keagamaan Buddha di Lapas Pemuda Tangerang yaitu; 1) Sudah ada sarana ibadah narapidana yang beragama Buddha sejak akhir tahun 2012, yaitu Cetiya Kusala Cetana; 2) Adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini adalah IPTI yang mengkoordinir pelaksanaan pembinaan keagamaan Buddha (Imantoro dan Suratmin, wawancara 15 Desember 2012).

#### Upaya Mengatasi Hambatan Pembinaan Keagamaan Buddha

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Lapas Pemuda Tangerang dalam mengatasi hambatan antara lain sebagai berikut.

Pertama, pihak Lapas akan menginventarisasi kebutuhan fasilitas pembinaan keagamaan dari semua agama, dan akan mencoba memenuhi di tahun depan.

“...ya kita inventarisasi dulu mas kebutuhannya apa, yang urgent kita anggarkan di anggran tahun berikutnya, walaupun nanti pelaksanaannya tidak semudah itu mas” (Imantoro, wawancara 15 Desember 2012).

Kedua, pihak Lapas bekerjasama dengan IPTI mengadakan perayaan hari raya Waisak di Cetiya Kusala Cetana. Selain itu tiap tiga bulan akan diadakan perayaan ulang bersama di Cetiya untuk para narapidana yang beragama Buddha pada saat jadwal pembinaan.

“Untuk perayaan ulang tahun bersama sudah dijalankan sejak April 2012” (Imantoro, wawancara, 15 Desember 2012).

Ketiga, pihak Lapas bekerja sama dengan Dinas Pendidikan mengadakan program pendidikan penyetaraan yaitu Kejar Paket A (setara SD), Kejar Paket B (setara SMP), dan Kejar Paket C (setara SMA) (Imantoro, wawancara 15 Desember 2012). Sementara itu untuk meningkatkan pengetahuan *Dhamma*

pihak Lapas bekerja sama dengan IPTI untuk menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pendidikan agama Buddha di Cetiya Kuasala Cetana.

Keempat, Berkaitan dengan hambatan faktor motivasi narapidana, pihak Lapas dan para pembina tidak bosan-bosannya mengingatkan para narapidana untuk mengikuti kegiatan pembinaan keagamaan Buddha setiap hari sabtu, selain itu sosialisasi kegiatan ini ke para narapidana beragama Buddha yang berada di sel-sel juga dilakukan.

“Para Romo Pandita dan Pembina keagamaan lain ini yang mengeluarkan keterangan perubahan perilaku narapidana. Surat itu akan berguna bagi sebagai syarat pengajuan cuti, diharapkan dengan cara ini akan memotivasi narapidana untuk mengikuti pembinaan keagamaan” (Suratmin, wawancara 13 Desember 2012).

Kelima, Berkaitan dengan hambatan faktor eksternal, Pihak Lapas mengajukan surat permohonan kepada Pembimbing Masyarakat Buddha Kantor Wilayah Banten) untuk mengirimkan tenaga penyuluh agama Buddha melakukan pembinaan di Lapas Pemuda Tangerang minimal tiga bulan sekali. Hasilnya Lapas Klas IIA Pemuda Tangerang mendapat jadwal penyuluh agama dari Bimas Buddha setiap dua bulan sekali. Selain itu Lapas juga akan menjalin kerjasama dengan Majelis-majelis agama Buddha (Imantoro, wawancara 15 Desember 2012).

## **Pola Pembinaan Keagamaan**

Pembinaan keagamaan bagi narapidana di dalam Lapas tidak terlepas dari dinamika yang bertujuan memberikan bekal kepada narapidana dalam menyongsong kehidupan baru setelah bebas untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya hubungan dengan masyarakat. Diharapkan para narapidana dapat lebih giat mempraktekkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu menjalani kehidupan normal dan turut serta berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Perubahan dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan

secara konseptual dan historis sangatlah berbeda. Asas yang dianut sistem pemasyarakatan menempatkan tahanan, narapidana, anak negara, dan klien pemasyarakatan sebagai subjek dan dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan, tetapi dengan pembinaan dan pembimbingan. Perbedaan kedua sistem tersebut berimplikasi pada perbedaan dalam cara-cara pembinaan dan pembimbingan serta membawa dampak mengedepankan demokrasi pembinaan yang mengutamakan penghormatan dan penegakan hak asasi manusia (para narapidana).

Dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan Buddha di Lapas Klas IIA Pemuda Tangerang, telah dilakukan pola baru yaitu sistem pemasyarakatan dengan fokus pembinaan reintegrasi sosial sebagai perubahan dari sistem lama kepenjaraan yang menekankan pembalasan kepada para narapidana. Pada prinsipnya pola pembinaan sesuai dengan teori-teori pembinaan yang telah dikemukakan di landasan teori. Teori yang digunakan dalam pembinaan keagamaan Buddha di Lapas Klas IIA Pemuda Tangerang adalah Teori Relatif (*Utilitarian*) dan Teori Gabungan (*integratif*). Teori Relatif (*Utilitarian*) dikatakan sesuai dengan pola pembinaan di Lapas Pemuda Tangerang karena penjatuhannya hukuman bagi para narapidana sebagai upaya membuat efek jera yang berguna mencegah terulangnya kembali tindak kejahatan yang pernah diperbuat dan untuk menjaga ketertiban umum, meskipun realitasnya masih ada residivis. Terkait hal tersebut Kasi Pembinaan Narapidana, Imantoro, menyatakan sebagai berikut.

“Kalau untuk mengetahui apakah narapidana yang keluar dari Lapas Pemuda ini menjadi residivis atau tidak itu susah mas. Masalahnya kalau narapidana tersebut melakukan kejahatan lagi tapi di luar daerah Tangerang, kan itu susah melacaknya” (wawancara, 15 Desember 2012).

Teori Gabungan juga sesuai dengan pola pembinaan narapidana di Lapas Pemuda Tangerang. Hal tersebut tampak pada penempatan narapidana di Lapas Pemuda Tangerang yang membatasi kemerdekaan mereka dengan



tujuan mencegah kejahatan, menjaga ketertiban masyarakat, dan untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar berperilaku wajar dan pantas dengan mengajarkan nilai-nilai keagamaan.

Kerjasama yang dibangun antara Lapas Pemuda Tangerang dengan pihak ketiga (IPTI) yang mengatur jadwal Romo Pandita dari berbagai majelis agama Buddha di Indonesia untuk melakukan pembinaan keagamaan Buddha di Lapas Pemuda Tangerang di bawah pengawasan pihak Lapas adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban Lapas atas tidak adanya petugas pembina agama Buddha. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 9 yang berbunyi:

Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan pemasyarakatan (WBP), Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Meskipun demikian, penyelenggaraan pembinaan keagamaan Buddha di Lapas Pemuda Tangerang berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa peran Lapas dalam mengkoordinasikan program-program pembinaan dengan unsur-unsur pendukung sistem pemasyarakatan di luar Lapas dirasa belum optimal. Ketua IPTI menyatakan sebagai berikut.

“Peran Lapas perlu ditingkatkan terutama dalam menjembatani kebutuhan-kebutuhan bagi narapidana sehingga ada kegiatan pembinaan keagamaan Buddha yang meningkatkan animo narapidana, misalnya kerjasama dengan majelis agama Buddha untuk melakukan perayaan hari raya Waisak di Lapas, kayak Islam itu loh, kalau Maulud Nabi kan dirayakan di Lapas, malah para narapidana yang jadi panitianya” (Hendra, wawancara 14 Desember 2012).

Penting untuk diketahui bahwa dukungan dari instansi pemerintah (dalam hal ini Kementerian Agama) meskipun sudah ada,

tetapi belum sepenuhnya berjalan. Hal ini karena kurang baiknya komunikasi dan koordinasi antar pihak terkait. Solusi lain yang bisa diambil di antaranya pihak Lapas mengangkat pegawai pembina agama Buddha dengan latar belakang pendidikan yang sesuai (misalnya yang berlatar belakang pendidikan tinggi psikologi dan agama Buddha) agar pembinaan bisa maksimal.

Berdasarkan temuan penelitian, jenis pembinaan keagamaan Buddha di Lapas Pemuda Klas IIA Tangerang antara lain ceramah agama untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan, latihan pembacaan Paritta, latihan Puja Bakti (sembahyang), praktek meditasi (samadi), dan sedikit Vihara Gita (lagu-lagu Buddhis). Dalam hal ini Romo Adi Triswantoro menyatakan:

“Tujuan pembinaan keagamaan Buddha, baik di Lapas maupun di luar Lapas, paling tidak bertujuan memperkuat keyakinan (*saddha*), mengajarkan tatacara ritual (*puja bakti*), membentuk moralitas, dan agar umat bertambah pengetahuan dhammanya. Dengan memberikan pembinaan keagamaan terhadap narapidana diharapkan akan terjadi perubahan ke arah sikap religi yang lebih baik, diharapkan mereka menjadi bertobat setelah mendengarkan ajaran Buddha secara bersama-sama dengan narapidana lain dan akan timbul emosi keagamaan” (wawancara 3 Desember 2012).

Hal ini senada yang diungkapkan Koentjaraningrat (1987) bahwa kelakuan manusia yang bersifat religi bisa terjadi karena adanya suatu getaran atau emosi yang timbul dalam jiwa manusia sebagai akibat dari pengaruh rasa persatuan sebagai warga masyarakat.

Jenis pembinaan keagamaan Buddha yang sudah berjalan tersebut dirasa kurang optimal. Menurut penulis, pembinaan keagamaan Buddha untuk para narapidana, agar mencapai hasil lebih maksimal, paling tidak ada beberapa jenis.

1. *Dhammadesana* (ceramah Dhamma), sebagai metode penerangan agama Buddha dengan tujuan meningkatkan pengetahuan untuk penghayatan, pengamalan, dan keyakinan (meningkatkan *saddha*) serta meningkatkan bakti kepada agama, masyarakat, bangsa dan negara.

2. *Dhammasukaca* (diskusi Dhamma), bisa dilakukan dengan cara membahas tema tertentu dan didiskusikan bersama-sama para narapidana, atau dengan melakukan bimbingan dan konseling, dengan metode ini diharapkan narapidana dapat mengungkapkan permasalahannya secara terbuka dan para Romo Pandita dapat menyampaikan Dhamma secara implisit sehingga mudah diterima.
3. *Vihara Gita*, atau lagu-lagu Buddhis (lagu-lagu kerohanian) ini digunakan sebagai media untuk menyampaikan ajaran Buddha dan memperdalam keyakinan umat dirasa sangat efektif.
4. *Dharma Yatra*, metode ini memiliki pengertian usaha untuk meningkatkan pemahaman, pengamalan dan keyakinan para narapidana melalui kunjungan untuk melakukan ritual ke tempat suci yang berkaitan dengan agama Buddha. Metode ini sebagai bentuk pembinaan ektramural (pembinaan di luar Lapas) seperti yang telah dikemukakan pada landasan teori. Metode ini hanya khusus untuk narapidana yang sudah mendapat cuti bebas. Akan tetapi, metode ini bisa diterapkan dengan bantuan media elektronik yaitu dengan menayangkan film-film tentang tempat suci agama Buddha.
5. *Dharma Sadhana* (praktek/retreat meditasi), metode ini juga dirasa sangat tepat untuk para narapidana yang memiliki waktu luang banyak.
6. *Dharma Santi* (perayaan hari-hari besar keagamaan), selain untuk meningkatkan keyakinan dengan melakukan upacara perayaan hari besar keagamaan ini juga bermanfaat sebagai sarana interaksi para narapidana satu dengan yang lainnya. Jenis pembinaan ini memerlukan dana yang cukup besar, tetapi hal tersebut dapat diwujudkan dengan kerjasama yang baik antara pembina, narapidana, Lapas, keluarga narapidana dan masyarakat.

Bentuk ataupun metode pembinaan keagamaan Buddha, baik di dalam Lapas maupun di luar Lapas, bertujuan meningkatkan kedalaman spiritualitas secara individu, jangan sampai hanya terjebak dalam euforia semu, pelaksanaan agama jangan hanya didominasi oleh unsur ekspresi kemeriahan fisik, meningkatnya kuantitas pelaksanaan sembahyang (*pujabakti*), dan ramainya Vihara oleh umat.

Pembinaan keagamaan Buddha di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang yang dilaksanakan oleh para Romo Pandita tanpa honor sedikitpun. Hal tersebut merupakan loyalitas dan bentuk pengabdian serta kewajiban sebagai Romo Pandita. Hal ini sesuai dengan 5 cara benar mengajarkan Dhamma/5 sifat yang harus dimiliki oleh pembabar *Dhamma* (*dhammakathika*) menurut Udayi Sutta seperti yang sudah dibahas di landasan teori. Namun demikian, pembinaan keagamaan Buddha di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang belum memiliki kurikulum, ini dirasa sebagai salah satu titik lemah. Salah satu fungsi kurikulum adalah sebagai alat atau jembatan untuk mencapai tujuan pendidikan, jika tujuan pendidikan tidak tercapai maka yang ditinjau kembali adalah alat untuk mencapai yaitu kurikulum. Penyusunan kurikulum pembinaan keagamaan Buddha di Lapas dapat dilakukan oleh Kementerian Agama, dalam hal ini adalah Dirjen Bimas Buddha, sebagai pihak pembuat kebijakan. Selain kurikulum pembinaan keagamaan seharusnya, dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi melibatkan narapidana baik.

Komponen yang mendukung keberhasilan pembinaan narapidana setidaknya ada empat hal yakni: (1) diri narapidana sendiri; (2) keluarga; (3) masyarakat; dan (4) petugas, yang dalam hal ini dapat berupa polisi, pengacara, petugas Lapas, petugas keagamaan dan lain-lain (Priyanto, 2006). Keempat komponen ini harus dioptimalkan agar tujuan dari pembinaan dapat tercapai. Rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya pemahaman *Dhamma*, rendahnya motivasi mengikuti pembinaan adalah faktor-faktor penghambat yang dapat diinventarisasi dalam penelitian ini,

yang mana faktor penghambat tersebut berasal dari narapidana sendiri. Solusi yang paling tepat untuk mengatasi hal ini tentu harus muncul dari narapidana sendiri, sedangkan pihak luar seperti Romo Pandita dan petugas Lapas hanya sebagai stimulan saja.

Jumlah narapidana beragama Buddha di Lapas Klas IIA Pemuda Tangerang sebanyak 77 orang (3.84%) merupakan angka yang cukup tinggi mengingat pemeluk agama Buddha adalah minoritas di Tangerang. Oleh karenanya, sudah selayaknya pihak Lapas meningkatkan pembinaan keagamaan Buddha. Salah satu cara adalah mengangkat petugas pembina agama Buddha di lingkungan Lapas Klas IIA Pemuda Tangerang. Dengan mengatasi hambatan dari beberapa komponen tersebut maka keberhasilan pembinaan keagamaan Buddha dapat tercapai. Pada hakikatnya, manusia itu dapat berubah, dalam artian pribadi manusia dapat dan mudah dipengaruhi oleh sesuatu. Adanya faktor penghambat dan faktor pendukung, seperti yang sudah diinventarisasi dalam penelitian ini, seharusnya mendorong para pegawai secara struktural di jajaran lembaga pemasyarakatan untuk meningkatkan faktor pendukung dan meminimalisasi serta mencari solusi dari hambatan dalam pembinaan keagamaan Buddha. Dengan demikian, tujuan penyelenggaraan pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial dapat tercapai.

Pihak Lapas harus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan instansi lain (pemerintah maupun non pemerintah) yang *concern* terhadap pembinaan keagamaan Buddha. Publikasi pembinaan keagamaan Buddha dirasa penting untuk menghilangkan stigma buruk yang masih melekat di masyarakat terhadap narapidana. Dengan demikian diharapkan masyarakat peduli dan ikut berkontribusi dalam pembinaan narapidana. Kementerian Agama (dalam hal ini Dirjen Bimas Buddha) harus segera menyusun kurikulum pembinaan keagamaan Buddha untuk para narapidana.

## PENUTUP

Pembinaan keagamaan Buddha di Lapas Klas IIA Pemuda Tangerang sudah berjalan dan terintegrasi dalam program pembinaan Lapas. Seminggu satu kali setiap hari Sabtu pukul 08.00-12.00 WIB, bertempat di Cetiya Kusala Cetana yang terletak di dalam Lapas. Dalam pelaksanaannya, Lapas bekerja sama dengan lembaga luar yakni, Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (IPTI) yang mengkoordinir para Romo Pandita dari berbagai majelis agama Buddha. Model pembinaan adalah *direct contact* yaitu Romo Pandita melakukan pembinaan dengan bertatap muka langsung dengan narapidana. Sistem yang digunakan adalah *top down approach*, dalam hal ini narapidana tidak ikut terlibat dalam menentukan jenis pembinaan. Bentuk pembinaan yang dilakukan antara lain: (1) *Dhammadesana* (ceramah Dhamma); (2) latihan membaca *Paritta* dan *Puja Bhakti* (sembahyang); (3) *Vihara Gita* (lagu rohani); dan (4) *Dhamma Sadhana* (retreat meditasi).

Pelaksanaan pembinaan dipengaruhi oleh adanya faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat terdiri dari: (1) Minimnya sarana pembinaan; (2) Tidak ada petugas khusus Pembina agama Buddha dari Lapas; (3) Kualitas dan ragam pembinaan yang kurang bervariasi; (4) Pendidikan dan pemahaman Dhamma para narapidana rendah; (5) Motivasi narapidana mengikuti pembinaan rendah; (6) Beberapa narapidana mengalami kendala bahasa dalam pembinaan (terutama narapidana Buddhis yang berasal dari luar negeri); (7) Koordinasi dengan pihak lain untuk melakukan pembinaan masih minim; (8) Publikasi pembinaan keagamaan Buddha di Lapas minim, implikasinya dukungan masyarakat terhadap pembinaan rendah.

Hambatan dalam pembinaan keagamaan Buddha diatasi oleh pihak Lapas Klas IIA Pemuda Tangerang dengan dilakukan berupa hal-hal, antara lain: (1) Menambah sarana pembinaan termasuk penyediaan buku-buku keagamaan Buddha; (2) Bekerjasama dengan Romo Pandita

dan para narapidana dalam penyusunan program pembinaan agar lebih efektif dan variatif; (3) Menjalinkan komunikasi dan koordinasi dengan Bimas Buddha Banten untuk penjadwalan rutin Penyuluh Agama Buddha, menjalin kerjasama dengan majelis-majelis agama Buddha dalam hal penjadwalan pembinaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- FISIP UI. 1974. *Diktat Tentang Pembinaan Anak Deliquensi, Seri Bacaan Wajib No 6*. Jakarta: UI Press.
- Harsono. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Jalaludin, 2007. *Psikologi Agama*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Koentjaraningrat. 1987. *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Nyanaponika, Bodhi. .2003. *Numerical Discourses of The Buddha*. terjemahan Wena, Lanny. Klaten: Vihara Bodhivamsa Wisma Dhammaguna Klaten.
- Priyatno, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Sanjivaputta, Jan. 1991. *II-1. Mangala Berkah Utama*. Lembaga Pelestari Dhamma.
- Setiawan, Anton. 2009. Pelaksanaan Pembinaan Menurut Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan (Studi di Lapas Klas IIA Binjai). *Tesis: Pasca Sarjana USU*.
- Sudjana, Djuju. 2006. *Evaluasi Program Pendidikan luar Sekolah: Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber daya Manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suprayogo, Tobroni, 2003. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Syukur, Ellyna. 2011. Sitem pemasyarakatan di Indonesia (Sistem Penjara ke Sistem pemasyarakatan). *Jurnal Penelitian Hukum APHI, DE JURE*. ISSN 1410-5632 Vol. 11. No.2, Maret – Mei 2011.

## Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana.

## Internet:

- Magabudhi Kota Tangerang. 2012. “Sejarah Magabudhi” <http://magabudhi-kotang.org/> diakses, 13 Oktober 2012.
- Anak Angkat, Rano Karno dan Obat Terlarang. <http://www.kompasiana.com/> diakses, 2 Oktober 2012.

## Referensi Lain

Dokumentasi Lapas Tangerang Tahun 2012

## Informan

- Tetra Destorie Imantoro, Kasi Pembina Narapidana dan anak didik.
- Suratmin, Kasi Pembina Narapidana
- Hendra, Ketua IPTI
- Romo Adi Triswantoro (rohaniawan)
- Romo Kartika Yos (rohaniawan)
- Romo Adi Triswantoro (rohaniawan)
- Dede, Rudi, Toni, (narapidana).